

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1. Kajian Pustaka

##### 2.1.1. Definisi Audit

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens (2010:4).

Definisi audit adalah sebagai berikut:

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent and independent person”.*

Pernyataan di atas mendefinisikan audit sebagai suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Soekrisno Agoes (2012:3), dalam *“Auditing”* (Audit Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik)” pengertian *auditing* adalah sebagai berikut:

*”Auditing adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.*

Sedangkan menurut Mulyadi (2013:9) definisi *auditing* secara umum adalah:

“*Auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Berdasarkan definisi-definisi *auditing* di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait dengan *auditing*, dimana yang diaudit atau diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuannya. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan independen yaitu akuntan publik. Hasil dari pemeriksaan tersebut dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa agar dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemakai laporan keuangan.

#### **2.1.1.1. Tujuan Audit**

Menurut Alvin A. Arens (2012:104) berdasarkan seksi PSA 02 (SA 110) menyatakan:

“Tujuan umum audit atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran dimana laporan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.

Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya.

#### **2.1.1.2. Jenis-jenis Audit**

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2012:16) mengemukakan bahwa:

“Akuntan publik melakukan tiga jenis utama aktivitas audit:

1. Audit operasional (*operational audit*)
2. Audit ketaatan (*compliance audit*)
3. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)”

Adapun penjelasan dari jenis-jenis audit menurut Arens *et.al* tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Audit Operasional (*Operational Audit*)**

Audit operasional merupakan pemeriksaan atas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitasnya. Audit operasional dapat menjadi alat manajemen yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi

efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang.

## **2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)**

*Compliance Audit* atau audit ketaatan merupakan pemeriksaan untuk menentukan apakah prosedur, aturan, atau, ketentuan tertentu yang diterapkan oleh otoritas yang lebih tinggi telah diikuti oleh pihak yang diaudit. Berikut adalah contoh-contoh audit ketaatan untuk suatu perusahaan tertutup.

- Menentukan apakah personel akuntansi mengikuti prosedur yang digariskan oleh pengawas perusahaan.
- Telaah tarif upah untuk melihat ketaatan dengan ketentuan upah minimum.
- Memeriksa perjanjian kontraktual dengan bankir dan pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan menaati persyaratan-persyaratan hukum.

## **3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)**

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya

yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.

### **2.1.1.3. Jenis-jenis Auditor**

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2012:19) auditor yang paling umum terdiri dari empat jenis yaitu:

#### **1. Auditor Independen (Akuntan Publik)**

Audit independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggungjawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akauntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

## **2. Auditor Pemerintah**

Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. BPKP mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Sedangkan Itjen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen atau kementriannya.

## **3. Auditor Pajak**

Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

#### **4. Auditor Internal (*Internal Auditor*)**

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja-karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketiadaan independensi ini merupakan perbedaan utama antara auditor internal dan KAP.

#### **2.1.2. Skeptisisme Profesional**

##### **2.1.2.1. Definisi Skeptisisme Profesional**

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2012:462) yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah suatu sikap auditor yang tidak mengasumsikan manajemen tidak jujur tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut”

Siti Kurnia dan Ely Suharyanti (2010:42) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis dibukti audit”

Dari pernyataan di atas, terdapat poin-poin penting yang merupakan prinsip utama skeptisisme profesional auditor dalam penugasan audit diantaranya. Sebagai seorang profesional, auditor diminta untuk bersikap skeptis profesional dengan selalu mempertanyakan dan menilai secara kritis atas bukti audit. Seorang auditor juga diminta untuk bersikap *skeptic professional* dalam proses audit untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kompetensi dari bukti audit yang sudah dikumpulkan secara objektif. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen bersikap tidak jujur, tetapi kemungkinan mereka bersikap tidak jujur harus tetap dipertimbangkan. Pada saat yang sama auditor juga tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen tidak diragukan lagi kejujurannya.

Skeptisisme merupakan manifestasi dari objektivitas. Skeptisisme tidak berarti bersikap sinis, terlalu banyak mengkritik, atau melakukan penghinaan. Auditor yang memiliki sikap skeptisisme yang memadai akan berhubungan dengan pertanyaan berikut:

1. Apa yang perlu saya ketahui?
2. Bagaimana cara saya agar dapat mendapatkan informasi dengan baik?
3. Apakah informasi yang saya peroleh masuk akal?

Skeptisisme profesional auditor akan mengarahkannya untuk menanyakan setiap isyarat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan.

Skeptisisme profesional yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan, baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan (*accounting error*) dan kecurangan (*fraud*) (Tuannakota, 2011:77).

Auditor yang disiplin menerapkan skeptisisme profesional, tidak akan terpaku pada prosedur audit yang tertera dalam program audit. Skeptisisme profesional akan membantu auditor dalam menilai dengan kritis risiko yang dihadapi dan memperhitungkan risiko tersebut dalam bermacam-macam keputusan (seperti menerima atau menolak klien; memilih metode dan teknik audit yang tepat; menilai bukti-bukti yang dikumpulkan, dan seterusnya). (Tuannakota, 2011:78)

#### **2.1.2.2. Karakteristik Skeptisisme Profesional**

Menurut Fullerton dan Durtschi (2003:17) mengembangkan model sebagai indikator dalam mengukur skeptisisme profesional yang telah diadopsi oleh Octavia (2014). Model yang mereka buat tersebut mengatakan bahwa skeptisisme profesional auditor terdiri atas 6 karakteristik, yaitu:

- “1. Pikiran yang selalu bertanya-tanya (*questioning mind*),
2. Suspensi pada penilaian (*suspension on judgement*),
3. Pencarian pengetahuan (*search of knowledge*)
4. Pemahaman antarperorangan (*interpersonal understanding*),
5. Percaya diri (*self confident*), dan
6. Penentuan Sendiri (*self determination*)”.

Yang dimaksud dari keenam karakteristik skeptisisme profesional di atas adalah sebagai berikut:

1. Pikiran yang selalu bertanya-tanya (*questioning mind*), yaitu karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian dan pembuktian akan suatu objek. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu:
  - Auditor menolak suatu pernyataan atau *statement* tanpa pembuktian yang jelas.
  - Memberikan pertanyaan atas hal meragukan yang dilihat dan didengar.
2. Suspensi pada penilaian (*suspension on judgement*), yaitu karakteristik yang mengindikasikan seseorang untuk membutuhkan waktu lebih lama dalam membuat keputusan yang matang serta menambahkan informasi untuk mendukung pertimbangan tersebut. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu:
  - Membutuhkan informasi yang lebih untuk membuat keputusan.
  - Tidak secara terburu-buru dalam pengambilan keputusan.
  - Tidak akan membuat keputusan jika informasi belum *valid*.
3. Pencarian pengetahuan (*search of knowledge*), yaitu karakteristik yang didasari rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu:
  - Berusaha mencari dan menemukan informasi yang baru.
  - Menyenangkan bila menemukan informasi yang baru.
  - Menyenangkan bila dapat membuktikan informasi baru tersebut.

4. Pemahaman antarperorangan (*interpersonal understanding*), yaitu pemahaman sikap skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi serta integritas dari penyedia suatu informasi. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu:
  - Berusaha untuk memahami perilaku orang lain.
  - Berusaha untuk memahami alasan seseorang berperilaku demikian.
5. Percaya diri (*self confident*), yaitu percaya diri secara profesional dalam bertindak terhadap bukti yang sudah dikumpulkan. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu:
  - Percaya pada diri sendiri secara profesional.
  - Percaya akan kemampuan diri.
6. Penentuan sendiri (*self determination*) sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif terhadap bukti yang sudah dikumpulkan. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu:
  - Tidak akan secara langsung menerima ataupun membenarkan pernyataan orang lain.
  - Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain terhadap suatu hal.
  - Memecahkan informasi yang tidak konsisten.

Kemudian keenam hal ini akan membawa seorang auditor pada 4 peningkatan sikap skeptis, yaitu:

1. Peningkatan dalam hal pencarian tambahan,
2. Pendeteksian hal-hal yang kontradiktif,
3. Alternatif hal-hal yang mungkin terjadi, dan
4. Penelitian cermat atas keandalan suatu sumber.

### **2.1.2.3. Unsur-unsur Skeptisisme Profesional**

Unsur-unsur skeptisisme profesional dalam definisi *International Federation of Accountants* (IFAC) dalam (Tuannakotta:78):

- “1. *A critical assessment*-ada penilaian yang kritis tidak menerima begitu saja.  
 2. *With a questioning mind*-dengan cara berpikir yang terus-menerus bertanya dan mempertanyakan.  
 3. *Of the validity of audit evidence obtained*-keabsahan dari bukti audit yang diperoleh.  
 4. *Alert to audit evidence that contradicts*-waspada terhadap bukti yang kontradiktif.  
 5. *Brings into question the realibility of documents and responses to inquiries and other information*-mempertanyakan keandalan dalam dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.  
 6. *Obtained from management and those charged with governance*-yang diperoleh dari manajemen yang berwenang dalam pengelolaan (perusahaan).”

Skeptisisme profesional berakal dari konsep kebaratan. Para auditor diharapkan untuk dapat cukup skeptis mengenai motif-motif manajer dan akurasi dari neraca serta pengungkapan yang dibuat oleh manajemen. Deutsch (1986) dan Shaub (1996) mendefinisikan pilihan yang mencurigakan sebagai suatu pilihan untuk terlibat dalam perilaku untuk mencegah dan mengurangi konsekuensi dari pelaku

orang lain. Perilaku pencegahan adalah konsisten dengan tanggung jawab auditor, pencegahan yang dilakukan oleh auditor salah satunya adalah mengawasi sikap dan perilaku manajemen ketika sedang dilakukan pengujian audit. Resiko yang paling mengganggu dalam audit yang dipandang dari sudut pandang kecurigaan adalah tekanan daripada kepercayaan, sehingga seorang auditor harus dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai respon langsung terhadap kecurigaan pada klien.

#### **2.1.2.4. Faktor yang Mempengaruhi Skeptisisme Profesional**

Siegel dan Marconi (1989) dalam Noviyanti (2008) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh:

1. Faktor sosial (kepercayaan) adalah kepercayaan dari auditor terhadap klien, manajemen dan staff klien menunjukkan bagaimana interaksi sosial auditor dengan klien.
2. Faktor psikologikal (penaksiran risiko kecurangan) adalah penaksiran risiko kecurangan merupakan faktor psikologikal yang diberikan oleh atasan auditor sebagai motivasi dalam melakukan audit dilapangan. Penaksiran risiko kecurangan yang tinggi yang diberikan oleh atasan auditor kepada auditor diharapkan dapat memotivasi auditor bersikap skeptis pada bukti audit yang diperiksanya.

3. Faktor personal (kepribadian) adalah pengalaman, gender, dan tipe kepribadian. Pengalaman auditor terduga kecurangan juga diduga membentuk sikap skeptisisme profesional auditor. Faktor genetik seperti gender dan tipe kepribadian akan menciptakan predisposisi pada pengembangan sikap tertentu.

### **2.1.3. Independensi Auditor**

#### **2.1.3.1. Definisi Independensi Auditor**

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:40) independensi adalah sebagai berikut :

“Independen artinya tidak mudah di pengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun”.

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialihbahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:74) menyatakan bahwa :

”Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak biasa dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian, dan penerbitan laporan audit”.

Sedangkan Mulyadi (2013:26) menyatakan independensi adalah:

“Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti adanya

kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya”.

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:64)

menyatakan bahwa independensi yaitu:

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan”

Selanjutnya menurut Soekrisno Agoes (2012:34-35) pengertian independen bagi akuntan publik (eksternal auditor dan internal auditor) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis independensi:

“1. *Independence in fact* (independensi dalam kenyataan/dalam menjalankan tugasnya).

*In fact*, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesionalnya, bisa menjaga integritas dan selalu menaati kode etik profesionalnya, profesi akuntan publik, dan standar professional akuntan publik. Jika tidak demikian, akuntan publik *in fact* tidak independen. *In fact* internal auditor bisa independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik internal auditor dan jasa *professional practice framewrok of internal auditor*, jika tidak demikian internal auditor *in fact* tidak independen.

2. *Independence in appearance* (independensi dilihat dari penampilannya di struktur organisasi perusahaan).

*In appearance*, akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak luar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan.

3. *Independence in mind* (independensi dalam pikiran).

*In mind*, misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit *adjustment* yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan *findings* tersebut untuk memeras *auditee* walaupun baru pikiran, belum dilaksanakan. *In mind* auditor sudah kehilangan independensinya. Hal ini berlaku baik untuk akuntan publik maupun internal auditor”.

Independensi merupakan salah satu komponen yang harus dijaga atau dipertahankan oleh akuntan publik. Independensi dimaksudkan seorang auditor mempunyai kebebasan posisi dalam mengambil sikap maupun penampilannya dalam hubungan pihak luar terkait dengan tugas yang dilaksanakannya. Independensi bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun.

### 2.1.3.2. Dimensi Independensi Auditor

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:64-65)

menekankan tiga dimensi dari independensi sebagai berikut:

“1. Independensi Program (*Programming Independence*)

*Programming Independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit, dan berapa dalamnya teknik dan prosedur audit.

2. Independensi Investigatif (*Investigative Independence*)

*Investigative Independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang *legitimate* (sah) yang tertutup bagi auditor.

3. Independensi Pelaporan (*Reporting Independence*)

*Reporting Independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.”

Berdasarkan ketiga dimensi independensi tersebut, Mautz dan Sharaf mengembangkan petunjuk yang mengidentifikasi apakah ada pelanggaran atas independensi:

“1. Independensi Program Audit (*Programming Independence*)

1. Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang dimaksudkan untuk menghilangkan (*eliminate*), menentukan (*specify*). Atau mengubah (*modify*) apapun dalam audit.
2. Bebas dari intervensi apapun dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.
3. Bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu di lihat di luar batas-batas kewajaran dalam proses audit.

2. Independensi Investigatif (*Investigative Independence*)

1. Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, catatan, pimpinan, pegawai perusahaan, dan sumber informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan, kewajibannya, dan sumber-sumbernya.

2. Kerjasama yang aktif dari pimpinan perusahaan selama berlangsungnya kegiatan audit.
  3. Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu *evidental matter* (sesuatu yang mempunyai nilai pembuktian).
  4. Bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan menghilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan, atau orang yang seharusnya masuk dalam lingkup pemeriksaan.
3. Independensi Pelaporan (*Reporting Independence*)
1. Bebas dari perasaan loyal kepada seseorang atau merasa berkewajiban kepada seseorang untuk mengubah dampak dari fakta yang dilaporkan.
  2. Menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal dan memasukannya kedalam laporan informal dalam bentuk apapun.
  3. Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang disengaja maupun tidak didalam pernyataan fakta, opini, rekomendasi, dan dalam interpretasi.
  4. Bebas dari upaya memveto judgement auditor mengenai apa yang seharusnya masuk dalam laporan audit, baik yang bersifat fakta maupun opini”.

Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Mautz dan Sharaf sangat jelas masih relevan untuk auditor adalah petunjuk-petunjuk yang menentukan apakah seorang auditor memang independen.

### **2.1.3.3. Ancaman-ancaman Terhadap Independensi**

Menurut Mulyadi (2013:27) auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban memperhatikan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, di samping auditor harus benar-benar independen, ia harus menimbulkan persepsi di

kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Sikap mental independen auditor menurut persepsi masyarakat inilah yang tidak mudah memperolehnya.

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2012:75) ada lima faktor yang mengancam independensi, yaitu:

1. Kepemilikan finansial yang signifikan
2. Pemberian jasa non-audit kepada klien
3. Imbalan jasa audit
4. Tindakan hukum antara KAP dan klien
5. Pergantian auditor

Adapun penjelasan dari ancaman-ancaman independensi menurut Arens *et.al* tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Kepemilikan Finansial yang Signifikan**

Kepemilikan finansial dalam perusahaan yang diaudit termasuk kepemilikan dalam instrumen utang dan modal (misalnya pinjaman dan obligasi) dan kepemilikan dalam instrumen derivatif (misalnya opsi). Tidak ada praktik yang dapat menerima atau mempertahankan sebuah perusahaan sebagai klien audit jika ada seseorang (atau kerabat dekatnya) yang kenyataannya memiliki proporsi kepemilikan yang signifikan di perusahaan tersebut. Antisipasi terhadap kepemilikan langsung maupun tidak langsung yang besarnya signifikan di perusahaan klien dapat berdampak luas pada operasi KAP.

## 2. Pemberian Jasa Non-audit kepada Klien

Baik manajemen maupun perwakilan dari manajemen sering kali berkonsultasi dengan akuntan lainnya dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi. Meskipun konsultasi dengan akuntan lainnya merupakan praktik yang umum, namun hal ini dapat mengakibatkan hilangnya independensi dalam kondisi tertentu. Penelitian dalam profesi akuntan di Amerika Serikat di akhir 1970-an oleh senator Metcalf dan anggota kongres Moss menyimpulkan bahwa jasa manajemen dapat membahayakan kinerja audit independen. Berikut adalah sembilan jasa yang tidak diperkenankan:

- Jasa pembukuan dan akuntansi lain.
- Perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan.
- Jasa penaksiran atau penilaian.
- Jasa aktuarial.
- *Outsourcing* audit internal.
- Fungsi manajemen dan sumber daya manusia.
- Jasa pialang atau dealer atau penasihat investasi atau bankir investasi.
- Jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit.
- Semua jasa lain yang ditentukan oleh peraturan PCAOB sebagai tidak diperkenankan.

### **3. Imbalan Jasa Audit**

Cara auditor untuk berkompetisi mendapatkan klien dan menetapkan imbalan jasa audit dapat memberikan implikasi penting bagi kemampuan auditor untuk menjaga independensi auditnya. Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada tiga isu penting, yaitu ketergantungan atas imbalan jasa audit, imbalan jasa audit yang belum dibayar sebagai utang, dan penentuan imbalan jasa audit.

- Ketergantungan pada imbalan jasa audit.

Independensi auditor dalam kenyataannya dan penampilan akan diragukan jika imbalan jasa audit dari satu klien merupakan bagian yang signifikan dari total pendapatan kantor akuntan publik tersebut. Auditor disarankan mampu menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi tidak mengganggu independensi, dengan memastikan imbalan jasa audit dari seorang klien audit atau grup audit tidak melebihi batas wajar.

- Imbalan jasa audit yang belum dibayar.

Ketika ada imbalan jasa audit yang signifikan besarnya belum dibayar untuk pekerjaan yang telah selesai sebelumnya oleh auditor, imbalan jasa audit yang belum dilunasi tersebut dapat dianggap memiliki

karakteristik yang sama seperti pinjaman setelah jatuh tempo dalam periode piutang normal. Dalam kondisi seperti itu auditor harus mempertimbangkan apakah independensi audit dapat menurun dan jika hal ini diyakini kebenarannya, maka harus dilakukan segala langkah yang memungkinkan untuk menarik diri dari penguasaan audit ini.

- Penetapan imbalan jasa audit.

Imbalan jasa audit atas kontrak kerja audit merefleksikan nilai wajar atas pekerjaan yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap jenis pekerjaan yang dilakukan.
- b. Tingkat pendidikan dan pengalaman personel yang melakukan pekerjaan tersebut.
- c. Tingkat tanggung jawab yang terkandung dalam pekerjaan tersebut.
- d. Waktu yang dibutuhkan oleh semua personel yang mengerjakan pekerjaan tersebut.

#### **4. Tindakan Hukum Antara KAP dan Klien**

Tindakan hukum oleh klien untuk jasa perpajakan atau jasa non-audit lainnya, atau tindakan melawan klien maupun KAP oleh pihak lain tidak akan menurunkan independensi dalam pekerjaan audit. Pertimbangan utama adalah kemungkinan dampak terhadap kemampuan klien,

manajemen, dan personel KAP untuk tetap objektif dan memberikan opini dengan bebas.

## **5. Pergantian Auditor**

Riset di bidang audit mengindikasikan beragam alasan dimana manajemen dapat memutuskan untuk mengganti auditornya. Alasan-alasan tersebut termasuk mencari pelayanan dengan kualitas yang lebih baik, *opinion shopping*, dan mengurangi biaya. Keputusan untuk mengganti auditor dalam rangka mendapatkan akses pada pelayanan jasa yang lebih baik, dengan sendirinya tidak akan mengancam independensi auditor. Perlindungan terbaik bagi auditor terhadap ancaman independensi yang dapat muncul dari pergantian auditor ini adalah komunikasi.

### **2.1.4. Upaya Pendeteksian Kecurangan (*fraud*)**

#### **2.1.4.1. Definisi Pendeteksian Kecurangan (*fraud*)**

Pada dasarnya tindakan *fraud* dapat dibongkar oleh audit karena adanya indikasi awal serta perencanaan yang baik untuk menyingkap segala sesuatu mengenai tindak *fraud* yang mungkin terjadi, tim audit harus memiliki intuisi yang tajam melihat berbagai aspek internal perusahaan yang riskan (rawan) terjadi *fraud*.

Valery G Kumaat (2011:156) menyatakan bahwa:

“Mendeteksi *fraud* adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku *fraud* (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit)”.

Pendeteksian *fraud* merupakan suatu deteksi awal yang harus dilakukan agar tindak *fraud* dapat dicegah untuk tidak dilakukan, dan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan pengujian.

#### **2.1.4.2. Definisi Kecurangan (*fraud*)**

Pendeteksian kecurangan mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan yang memerlukan tindak lanjut auditor untuk melakukan investigasi. Koroy (2008) menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor. Atas literatur yang tersedia, dapat dipetakan empat faktor yang teridentifikasi yang menjadikan pendeteksian kecurangan menjadi sulit dilakukan sehingga auditor gagal dalam usaha mendeteksi. Faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

1. Karakteristik terjadinya kecurangan
2. Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan
3. Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit
4. Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan.

Identifikasi atas faktor-faktor penyebab, menjadi dasar untuk kita memahami kesullitan dan hambatan auditor dalam menjalankan tugasnya untuk mendeteksi

kecurangan. Meski demikian faktor-faktor itu tidaklah menjadi alasan untuk menghindari upaya pendeteksian kecurangan yang lebih baik.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:1) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

“Kecurangan didefinisikan sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atau laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset”.

Menurut Joseph T. Wells yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2005:8) menyatakan bahwa:

“Dalam pengertian luas, *fraud* dapat meliputi segala macam bentuk kriminal dengan menggunakan tipu muslihat sebagai modus operandinya”.

Menurut Hall yang dikutip oleh Hery (2016:66) kecurangan (*fraud*) adalah:

*“..a false representation of a material fact made by one party to another party with the intent to deceive and induce the other party to justifiable rely on the fact to his or her detriment”.*

Sedangkan menurut Alvins A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2008) mengklasifikasikan kecurangan sebagai berikut:

“1. Pelaporan keuangan yang curang, adalah saji atau pengauditan jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan itu. Sebagian besar kasus melibatkan salah saji jumlah yang disengaja, bukan pengungkapan.

2. Penyalahgunaan (*missappropriation*) aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aset entitas. Istilah penyalahgunaan aset biasanya digunakan untuk mengacu pada pencurian yang melibatkan pegawai dan orang lain dalam organisasi.”

Setianto, dkk (2008:11) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) yaitu sebagai berikut:

- “1. *Employee emblezzment* atau *accupational fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan pegawai karena jabatan atau kedudukannya dalam organisasi, yang menjadi korban atau yang dirugikan adalah organisasi atau perusahaan.
2. *Management fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, biasanya dengan melakukan penyajian laporan keuangan yang tidak benar untuk keuntungan organisasi atau perusahaan. Untuk menarik investor, manajemen.
3. *Invesment scam*, yaitu kecurangan yang dilakukan dengan membujuk investor untuk menanamkan uangnya pada suatu bentuk investasi dengan janji akan memperoleh hasil investasi yang berlipat dalam waktu cepat.
4. *Vendor fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemasok atau organisasi yang menjual barang/jasa dengan harga yang terlalu tinggi dibandingkan dengan kualitasnya, atau barang/jasanya tidak direalisasikan walaupun pembeli telah membayar, korbannya adalah pembeli.
5. *Customer fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan pembeli/pelanggan, pembeli tidak/kurang membayar harga barang/jasa yang diterima, korbannya adalah penjual.
6. *Computer fraud*, kecurangan yang dilakukan dengan cara merusak program komputer, data, sistem informasi, alat atau media yang digunakan yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi yang sistem komputernya dimanipulasi.”

Kecurangan (*fraud*) perlu dibedakan dengan kekeliruan (*error*). Perbedaan antara kecurangan (*fraud*) dan kekeliruan (*error*) terdapat pada tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak. Kekeliruan dapat dideskripsikan sebagai “*unintentional mistakes*” (kesalahan yang tidak disengaja). Kekeliruan dapat terjadi pada setiap tahap dalam pengelolaan transaksi, dari terjadinya transaksi, pendokumentasian, pencatatan, pengikhtisaran hingga

proses menghasilkan laporan keuangan. Kekeliruan (*error*) berarti salah saji (*misstatement*) atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja.

#### **2.1.4.3. Unsur-unsur Kecurangan (*fraud*)**

*Fraud* yang terjadi pada perusahaan atau korporasi dipengaruhi oleh unsur-unsur pendukung terjadinya kecurangan. Viraguna Bagoes Oka (2004:3) menyatakan bahwa:

“Unsur-unsur *fraud* adalah sebagai berikut:

1. Harus terdapat salah satu pernyataan (*misrepresentation*) dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*)
2. Fakta bersifat material (*material fact*)
3. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make knowingly or recklessly*)
4. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi
5. Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*) yang merugikan (*detriment*)”.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi unsur-unsur kecurangan (*fraud*) adalah harus mencakup adanya salah pernyataan dari suatu masa lampau atau sekarang mengenai fakta material, yang dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan dengan maksud untuk mencari keuntungan yang menyebabkan orang lain dirugikan. Kecurangan tidak akan terjadi apabila tidak ada unsur-unsur yang mendukungnya.

#### 2.1.4.4. Klasifikasi Kecurangan (*fraud*)

Menurut Examination Manual 2006 dari *Association of Certified Fraud Examiner* dalam Karyono (2013: 17-4), kecurangan terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

- a. Kecurangan Laporan (*fraudulent statement*) adalah terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*financial statement*) dan kecurangan laporan lain.
- b. Penyalahgunaan Aset (*asset misappropriation*) adalah terdiri atas kecurangan kas, dan kecurangan persediaan dan aset lain.
- c. Korupsi (*corruption*) adalah terdiri atas pertentangan kepentingan, penyuapan, hadiah tidak sah, dan pemerasan ekonomi. Pengertian korupsi bervariasi, namun secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan kelompok tertentu.
- d. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer, dapat berupa menambah, menghilangkan, atau mengubah masukan atau memasukan data palsu.

Menurut Siti dan Ely (2010:64) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) ke dalam dua kelompok utama yaitu:

- “1. Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan, untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material. Kecurangan ini mencakup tindakan seperti:

- a. Manipulasi, pemalsuan dan penggelapan data akuntansi dan dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
  - b. Representasi yang salah atau hilangnya peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan.
  - c. Penerapan salah prinsip akuntansi yang disengaja, berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
2. Penyalahgunaan aset (*misappropriation of asset*) merupakan salah saji yang timbul dari pencurian aset entitas yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kecurangan ini mencakup tindakan:
- a. Penggelapan tanda terima barang/uang.
  - b. Pencurian aset.
  - c. Tindakan yang menyebabkan entitas harus membayar atas harga barang yang tidak diterima”.

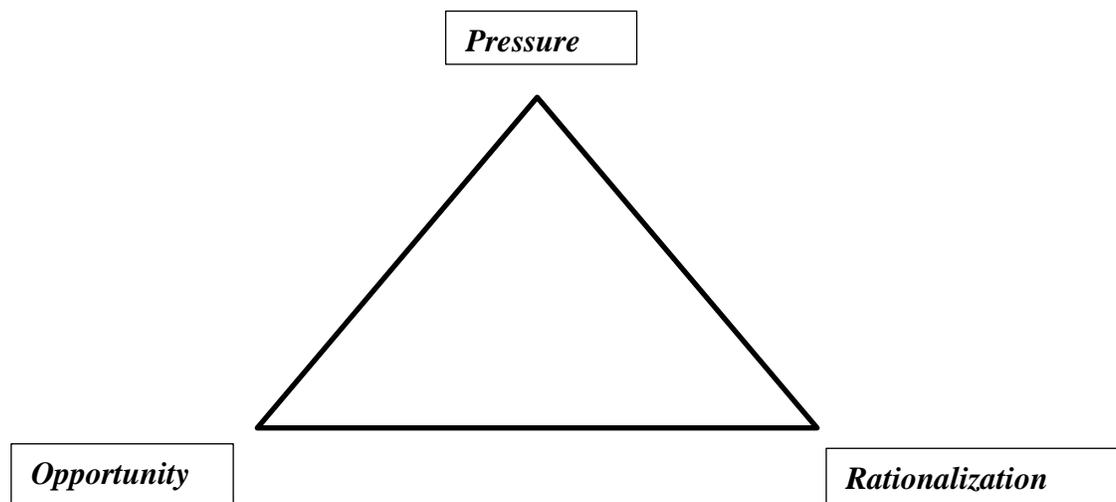
Sedangkan menurut Reksojoedo (2013:31-33) kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk tindakan, akan tetapi secara umum dapat dibagi menjadi tiga bentuk tindakan, yaitu:

- a. Pencurian (*the act*) adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara mengambil aset milik orang atau pihak lain dengan tanpa ijin atau secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki atau digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- b. Penyembunyian (*concealment*) adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan benda, surat data, informasi, atau fakta mengenai suatu transaksi atau mengenai aset perubahan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

- c. Perubahan (*conversion*) adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara mengubah suatu benda, surat, data, informasi atau fakta mengenai suatu transaksi atau mengenai aset perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Segala bentuk kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta hak orang lain atau pihak lain. Kecurangan dalam apapun bentuknya akan berpotensi merugikan pengguna laporan keuangan, karena menyediakan informasi laporan yang tidak benar untuk membuat keputusan.

#### 2.1.4.5. Faktor Pemicu Terjadinya Kecurangan (*fraud*)



**Gambar 2.1**  
**Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)**

Menurut SAS 99 (AU 316) yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2016:4) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal dengan istilah *fraud triangle*, yaitu:

“1. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang berani melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Faktor ini berasal dari individu si pelaku dimana ia merasa bahwa tekanan kehidupan yang begitu berat memaksa si pelaku melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadinya. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan jaminan kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja kurang atau pola hidup serba mewah sehingga si pelaku terus-menerus merasa kekurangan. Namun tekanan juga dapat berasal dari lingkungan tempatnya bekerja. Seperti: lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, karyawan merasa diperlakukan secara tidak adil, adanya proses penerimaan yang tidak *fair*.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Merupakan faktor yang sepenuhnya berasal dari luar individu, yakni berasal dari organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Kesempatan melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Kedudukan yang dimiliki, si pelaku merasa memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ditambah lagi dengan sistem pengendalian dari organisasi yang kurang memadai.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Pelaku merasa memiliki alasan yang kuat menjadi dasar untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Serta mempengaruhi pihak lain untuk menyetujui apa yang dia lakukan”.

Sedangkan menurut standar audit yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2016:200) terdapat tiga kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan, antara lain

- “1. Insentif atau tekanan, manajemn maupun karyawan memiliki insentif, dorongan, atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
2. Peluang, keadaan yang memberi peluang atau kesempatan bagi manajemen maupun karyawan untuk melakukan kecurangan.
3. Perilaku atau pembenaran atas tindakan, suatu perilaku atau karakter yang membuat manajemen maupun karyawan melakukan tindakan yang tidak

jujur, atau lingkungan yang membuat mereka bertindak tidak jujur dan membenarkan tindakan tidak jujur tersebut”.

#### **2.1.4.6. Upaya Auditor dalam Pendeteksian Kecurangan**

Menurut Karyono (2013:92-94) langkah mendeteksi kecurangan ialah memahami aktivitas organisasi dan mengenal serta memahami seluruh sektor usaha.

Salah satu upaya penting dalam mendeteksi kecurangan adalah kemampuan untuk mengenal dan mengidentifikasi secara cepat potensi dan penyebab terjadinya kecurangan. Berikut adalah upaya auditor untuk dapat mampu mendeteksi kecurangan:

- “1. Pengujian pengendalian intern
2. Dengan audit keuangan atau audit operasional
3. Pengumpulan informasi data intelejen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi
4. Penggunaan prinsip pengecualian dalam pengendalian dan prosedur
5. Dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi
6. Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan, dan institusi atasan.”

Yang dimaksud dari poin-poin di atas tentang upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah:

1. Pengujian pengendalian intern

Meliputi pengujian pelaksanaan secara mendadak dan secara acak. Hal ini untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian intern yang ada tidak berfungsi efektif.

2. Dengan audit keuangan atau audit operasional

Seorang auditor harus merancang dan melaksanakan auditnya sehingga kecurangan dapat terdeteksi.

3. Pengumpulan informasi data intelejen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi.

Dijelaskan bahwa pendeteksian ini dilakukan secara tertutup atau diam-diam mencari informasi tentang orang yang sedang dicurigai.

4. Penggunaan prinsip pengecualian dalam pengendalian dan prosedur

Antara lain:

- Transaksi-transaksi yang janggal seperti waktu transaksi hari minggu atau hari libur;
- Tingkat kepuasan kerja terus menerus menurun;

5. Dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi.

Auditor memperoleh informasi penyimpangan yang mencolok dalam hal anggaran, rencana kerja, tujuan, dan sasaran organisasi.

6. Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan dari karyawan.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu masalah yang sering terjadi dalam perusahaan baik perusahaan swasta maupun milik pemerintahan, kecurangan terjadi biasanya akibat adanya *fraud triangle* yaitu tekanan, kesempatan dan pembenaran.

Kecurangan semakin marak terjadi dengan berbagai macam cara yang terus berkembang sehingga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga harus terus menerus ditingkatkan, bagaimanapun juga auditor dituntut untuk tetap mampu mendeteksi kecurangan seandainya terjadi kecurangan dalam melaksanakan auditnya.

Kecurangan (*fraud*) dapat juga diistilahkan sebagai kecurigaan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. (Karyono 2013:4)

Upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (*fraud*) tersebut. (Fitriany, 2012:7)

### **2.2.1. Pengaruh Skeptisisme Profesional Terhadap Upaya Pendeteksian Kecurangan**

Skeptisisme profesional yang rendah menumpulkan kepekaan auditor dalam mendeteksi kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasi adanya kesalahan (*accounting error*) dan kecurangan (*fraud*) (Tuannakota, 2011:77)

SAS 1 (AU230) mensyaratkan bahwa audit dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi baik kekeliruan maupun

kecurangan yang material dalam laporan keuangan. Untuk mencapainya audit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisisme profesional atas semua aspek penugasan. (Alvin Arens, 2012:186)

Menurut Fullerton dan Durtschi (2004) dalam Eko Ferry Anggriawan (2014) adalah:

“Auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional yang tinggi akan membuat auditor tersebut untuk selalu mencari informasi yang lebih banyak dan lebih signifikan dari pada auditor yang memiliki tingkat skeptisisme profesional yang rendah, dan hal ini mengakibatkan auditor yang memiliki tingkat skeptisisme profesional yang tinggi akan lebih dapat mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*) karena informasi yang mereka miliki tersebut.”

Dengan demikian, dari pernyataan di atas semakin besar skeptisisme profesional seorang auditor maka semakin tinggi tingkat kemampuan dalam upaya mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nina Griyantini Rahayu (2015) tentang skeptisisme profesional auditor dalam upaya mendeteksi kecurangan, yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor. Menyimpulkan bahwa jika auditor diberi penaksiran yang lebih tinggi dalam mendeteksi kecurangan maka mempengaruhi sikap skeptisisme profesional auditor. Trinanda Hanum Hartan (2016) mengatakan apabila skeptisisme profesional yang dimiliki auditor tinggi, kemungkinan terjadinya kecurangan juga semakin kecil. Kesimpulannya adalah baik secara simultan maupun parsial, skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif pada pendeteksian kecurangan.

### **2.2.2. Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Upaya Pendeteksian Kecurangan**

Independensi merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat. Hal ini sangat diharapkan dari seorang akuntan publik untuk mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan dari keadaan oleh mereka yang berpikiran sehat (*rasionable*) dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi (SPAP, 2011:220), sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit. Seorang auditor yang memiliki dan mempertahankan sikap independensi tidak akan mempedulikan adanya gangguan, ancaman, bahwa tekanan dari pihak lain untuk mendeteksi suatu kecurangan yang terjadi karena auditor tersebut berintegritas tinggi. Semakin tinggi sikap independensi auditor, maka semakin meningkat pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Menurut Rahayu dan Suhayati (2010:58) dalam Pangestika (2014) adalah:

“Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, dan netral. Auditor yang independen tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapapun, auditor yang menemukan akan adanya kecurangan akan terus mencari tahu dan mengungkapkan kecurigaannya tersebut demi mempertahankan independensinya. Auditor juga harus bersikap mempertahankan objektivitas, agar tidak berbenturan dengan kepentingan lain, sehingga independensi merupakan landasan pokok bagi profesi akuntan publik.”

Menurut Mulyadi (2008:26) independensi, yaitu:

“Independensi merupakan sikap bebas dari pengaruh pihak lain, tidak dikendalikan dari pihak lain, dan tidak terpengaruh terhadap orang lain.”

Dengan demikian, dari pernyataan di atas akuntan publik yang independen haruslah akuntan publik yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpai dalam pemeriksaan atau dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Floreta Wiguna (2015) tentang independensi auditor terhadap mendeteksi kecurangan, yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Kesimpulan secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jordan Montandang (2010) dengan judul penelitian Pengaruh Pengalaman Audit, Independensi dan Keahlian Profesional Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa variabel independen

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel dependen (pendeteksian kecurangan).

Hasil penelitian ini mengasumsikan bahwa auditor harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen. Berdasarkan hasil penelitian di atas, auditor dituntut untuk mempertanggung jawabkan independensinya terhadap pendapat, simpulan, rekomendasi, ataupun pertimbangan yang diberikan terhadap hasil pemeriksaan yang mereka laksanakan. Maka, semakin tinggi independensi seorang auditor maka kecurangan pun akan berkurang.

### **2.2.3. Pengaruh Skeptisisme Profesional dan Independensi Auditor Terhadap Upaya Pendeteksian Kecurangan**

Setiap perusahaan bahkan instansi pemerintah dituntut memberikan laporan keuangan yang berkualitas kepada pihak yang berkepentingan, oleh sebab itu laporan tersebut harus terhindar dari kecurangan. Untuk mampu mendeteksi ada atau tidaknya kecurangan atas laporan keuangan, maka diperlukan auditor yang profesional.

Kemampuan auditor yang berkaitan dengan mendeteksi kecurangan adalah kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kurang wajarnya suatu laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan maupun organisasi dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan tersebut. Kemampuan auditor dapat

dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain skeptisisme profesional dan independensi yang dimiliki auditor.

Skeptisisme profesional sangat penting dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan, karena auditor tidak akan begitu saja percaya terhadap penjelasan klien dan akan mengajukan pertanyaan untuk mengumpulkan alasan yang relevan terhadap suatu objek yang diteliti. Skeptisisme profesional dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor-faktor kecondongan etika, dimana pengembangan kesadaran etika atau moral memiliki peran dalam semua area profesi akuntan, termasuk dalam melatih skeptisme profesional dari auditor. Selanjutnya ada faktor-faktor situasi yang berpengaruh secara positif terhadap skeptisme profesional auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki risiko tinggi dan dapat mempengaruhi auditor untuk meningkatkan skeptisme profesionalnya. Terakhir ada faktor pengalaman, faktor ini dapat dilihat dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Auditor yang memiliki pengalaman yang banyak, maka tingkat skeptisme profesionalnya lebih tinggi dibandingkan dengan auditor dengan pengalaman yang kurang.

Independensi yang dimiliki seorang auditor, tidak akan memihak kepada siapapun, sekalipun ia mendapatkan tekanan ataupun gangguan dari pihak lain. Auditor yang mempertahankan sikap independensinya akan mendapatkan kepercayaan dari publik karena laporan keuangan tersebut tidak ada manipulasi sehingga dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terlebih lagi bila terdapat kecurangan di dalamnya. Independensi juga

menjadi cerminan bahwa seorang auditor tersebut memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang auditor profesional.

Menurut Koroy (2008) menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor. Atas literatur yang tersedia, dapat dipetakan empat faktor yang teridentifikasi yang menjadikan pendeteksian kecurangan menjadi sulit dilakukan sehingga auditor gagal dalam mendeteksi kecurangan. Faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

1. Karakteristik terjadinya kecurangan
2. Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan
3. Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit
4. Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan.

Identifikasi atas faktor-faktor penyebab, menjadi dasar untuk memahami kesulitan dan hambatan auditor dalam menjalankan tugasnya untuk mendeteksi kecurangan. Meski demikian faktor-faktor itu tidaklah menjadi alasan untuk menghindarkan upaya pendeteksian kecurangan yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf Aulia (2013) tentang pengalaman, independensi dan skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksi kecurangan, yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pendeteksian kecurangan. Kesimpulannya adalah pengalaman, independensi dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dalam mendukung uraian di atas. Penelitian-penelitian tersebut dirangkum peneliti dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

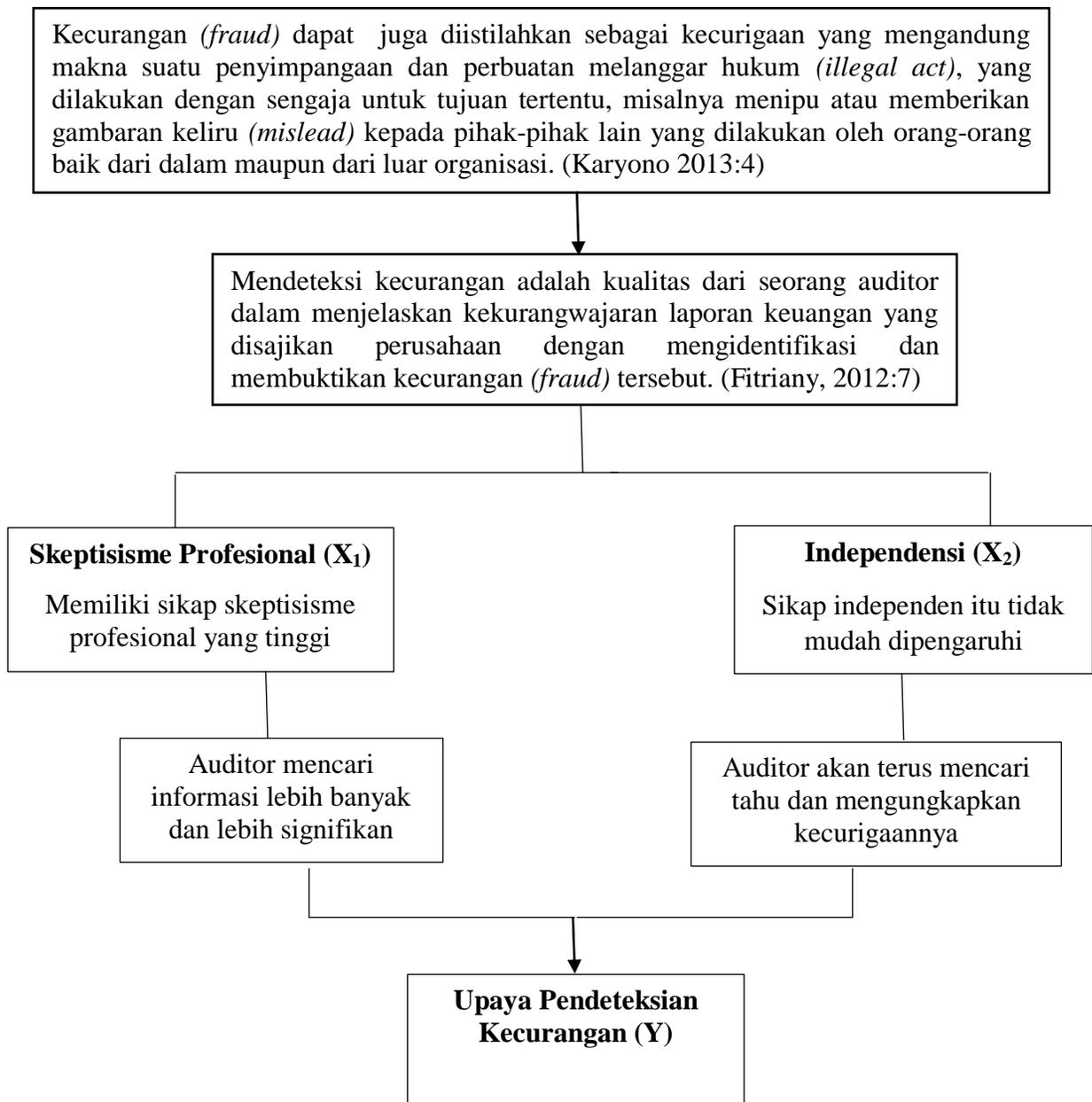
<b>No</b>	<b>Nama dan Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Kesimpulan</b>
1.	Floreta Wiguna (2015)	Pengaruh Skeptisisme Profesional dan Independensi Auditor Terhadap Mendeteksi Kecurangan (Survei Pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Kota Malang)	Perbedaan dengan penelitian ini adalah teknik samplingnya.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa skeptisisme profesional dan independensi auditor secara simultan dan parsial sangat berpengaruh terhadap mendeteksi kecurangan.
2.	Trinanda Hanum Hartan (2016)	Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi dan Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta)	Perbedaan dengan penelitian ini adalah teknik sampling dan objek penelitiannya.	Apabila skeptisisme profesional yang dimiliki auditor tinggi, kemungkinan terjadinya kecurangan juga semakin kecil. Kesimpulannya secara simultan maupun parsial, skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap mendeteksi kecurangan.

3.	Nina Griyantini Rahayu (2015)	Pengaruh Kompetensi Auditor dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Upaya Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Survey Pada Kantor Akuntan Publik Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bandung)	Perbedaan dengan penelitian ini adalah teknik sampling, variabel x yang ditelitinya.	Pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan skeptisisme profesional berpengaruh terhadap upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan.
4.	Jordan Montandang (2010)	Pengaruh Pengalaman Audit, Independensi dan Keahlian Profesional Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta)	Perbedaan dengan penelitian ini adalah teknik sampling, variabel x yang diteliti dan metode yang digunakannya.	Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa variabel independen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel dependen (pendeteksian kecurangan).
5	Lily Lovita Rustiana (2016)	Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi	Perbedaan dengan penelitian ini adalah hanya satu variabel x yang diteliti di penelitian ini hanya skeptisisme profesional.	Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa skeptisisme profesional tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor

		Kecurangan		dalam mendeteksi kecurangan.
6.	Muhammad Yusuf Aulia (2013)	Pengaruh pengalaman, independensi dan skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksi kecurangan (Studi Empiris pada KAP di Wilayah DKI Jakarta)	Perbedaan dengan penelitian ini adalah teknik sampling, variabel x yang diteliti dan metode yang digunakannya.	Kesimpulannya adalah pengalaman, independensi dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Karena jika seorang auditor memiliki pengalaman yang banyak, memiliki sikap independensi dan memiliki sikap skeptisme maka akan memudahkan dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



### 2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:93) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Kesimpulan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena kesimpulan yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat diajukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Terdapat Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Upaya Pendeteksian Kecurangan.
- H2 : Terdapat Pengaruh Independensi Auditor terhadap Upaya Pendeteksian Kecurangan.
- H3 : Terdapat Pengaruh Skeptisisme Profesional dan Independensi Auditor terhadap Upaya Pendeteksian Kecurangan.